

Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur

Rediyanto Putra

Abstract

- Email rediyanto92@gmail.com
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Riwayat artikel:

- Diterima 20 Januari 2021
- Direvisi 26 Desember 2021
- Disetujui 31 Desember 2021
- Tersedia Oktober 2023

The purpose of this paper is to examine economic and non-economic variables that affect economic growth and their impact on the welfare of the people in East Java Province. This research was conducted in districts / cities in East Java Province using a sampling method, namely purposive sampling. The research period carried out was for 5 years (2015-2019). Data analysis in this paper was carried out using path analysis using SPSS version 22.0. The results shown from the testing process that have been carried out have resulted in several findings: (1) economic growth in East Java Province is negatively affected by the inflation rate, negatively by regional spending, and positively by regional own income, (2) the inflation rate is capable of strengthening the negative influence of regional spending on economic growth, (3) the inflation rate is able to weaken the positive effect of local revenue on economic growth, (4) the results of the study show that the effect of regional expenditure and local revenue on economic growth will ultimately have an impact on welfare's people in East Java Province. Therefore, based on the results of research that has been carried out, it implies that the government must be able to control the inflation rate that occurs and balance the amount of regional income and expenditure in East Java Province to create maximum social welfare through maximizing economic growth.

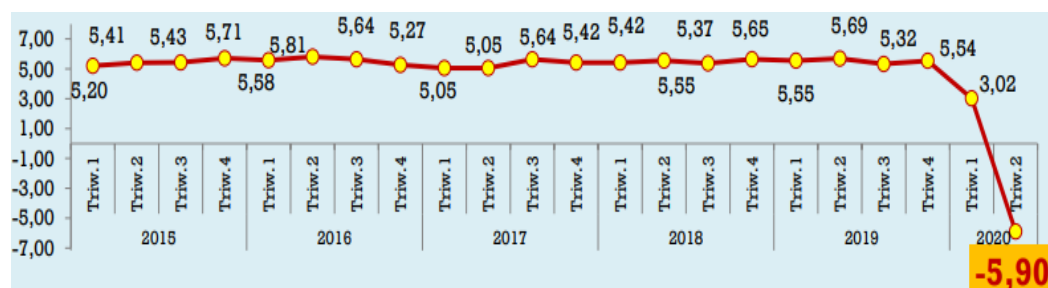
1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu ukuran umum yang ditujukan untuk melihat keberhasilan kondisi ekonomi dari suatu wilayah dari periode ke periode. Menurut Schumpeter dalam Putong (2015:141) pertumbuhan ekonomi ialah suatu tambahan dari output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh tambahan tingkatan tabungan dan penduduk. Suatu pertumbuhan ekonomi biasa digambarkan dengan menggunakan perbandingan ukuran seperti *Gross Domestic Product* (GDP;PDB) dan/atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan (Sukirno, 2012:61). PDRB merupakan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian untuk jangka waktu satu tahun serta dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo, Tatuh, & Sendouw, 2014).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sedang mengalami goncangan yang sangat besar akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% pada kuartal pertama merosot sampai ke minus 5,32% pada kuartal kedua pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pandemi COVID-19 selama kurang lebih 3 bulan telah membawa dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Kondisi yang serupa terkait menurunnya pertumbuhan ekonomi yang drastis juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang sangat tajam dari 3,02% pada kuartal pertama tahun 2020 menjadi minus 5,9% pada kuartal kedua tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih parah jika dibandingkan kondisi nasional.

GAMBAR-1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur



Sumber: (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020)

Perlu penjelasan yang merujuk ke Gambar1.

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang merosot akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini menjadi fokus penting yang harus segera untuk ditangani. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi akan dapat berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh seluruh wilayah dan negara. Kesejahteraan berkaitan erat dengan dimensi materi dan nonmateri. Pendekatan pendapatan dan konsumsi merupakan suatu ukuran kesejahteraan dari dimensi materi (Hukom, 2014). Pembangunan kesejahteraan masyarakat secara konseptual memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan sosial yang selaras dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Baharsyah, 1999; Hardiman, 1982). Gagalnya pembangunan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang kronis (Todaro & Smith., 2006:329).

Upaya perbaikan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berada dalam kondisi darurat saat ini dapat dilakukan jika faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi telah diketahui. Hal ini dikarenakan dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka penentuan arah

kebijakan yang diambil akan dapat dengan mudah untuk diketahui. Oleh karena itu, maka tulisan ini akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan penelitian mengenai ada/tidaknya dampak faktor-faktor tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini nantinya dapat memberikan kontribusi baik secara akademis ataupun kebijakan. Kontribusi akademis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memperkuat argumen yang dijelaskan oleh teori pertumbuhan ekonomi dan dipergunakan sebagai sumber acuan bagi civitas academica (mahasiswa, dosen, dan peneliti) untuk dapat melakukan penelitian dengan tema yang sejenis. Selain itu, kontribusi kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan, program, dan arah pembangunan yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi berdasarkan pada hasil penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana pada bagian ini akan diuraikan penjelasan-penjelasan mengenai konsep dan/atau teori dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tulisan ini juga turut diuraikan sebagai pedoman dan referensi tulisan. Pengembangan hipotesis menjadi bagian akhir dari tinjauan pustaka yang memberikan gambaran logis dugaan sementara yang akan diuji secara ilmiah pada tulisan ini.

Pertumbuhan Ekonomi & Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu ukuran umum yang ditujukan untuk melihat keberhasilan kondisi ekonomi dari suatu wilayah dari periode ke periode. Menurut Schumpeter dalam Putong (2015:141) pertumbuhan ekonomi ialah suatu tambahan dari output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh tambahan tingkatan tabungan dan penduduk. Suatu pertumbuhan ekonomi biasa digambarkan dengan menggunakan perbandingan ukuran seperti *Gross Domestic Product* (GDP;PDB) dan/atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara tahun sebelumnya dengan tahun berjalan (Sukirno, 2012:61). PDRB merupakan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian untuk jangka waktu satu tahun serta dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo et al., 2014).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada ilmu ekonomi dapat dijelaskan oleh berbagai macam pandangan dan teori. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang disampaikan oleh Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada produktivitas sektor produksi dalam menggunakan faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994). Teori ekonomi klasik menggunakan analisis yang didasari oleh kepercayaan pada efektivitas mekanisme pasar bebas.

Teori lain dari pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini meyakini bahwa peran dari pemerintah adalah penting bagi perekonomian untuk menjadi solusi dari kegagalan sistem pasar bebas. Teori Harrod-Domar merupakan suatu teori yang termasuk pada pertumbuhan ekonomi modern yang merupakan pengembangan teori Keynes jangka panjang. Pandangan pada teori ini adalah pengeluaran investasi selain dapat memiliki pengaruh pada permintaan agregat juga berpengaruh pada penawaran agregat melalui kapasitas produksi (Fajrin & Sudarsono, 2019). Teori pertumbuhan Schumpeter melengkapi faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu peran dari pengusaha melalui pembaruan inovasi kegiatan ekonomi. Inovasi yang diungkapkan dalam hal ini adalah pengenalan produk baru, peningkatan efisiensi produksi, pengembangan sumber mentah dan perluasan pasar. Selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang menyampaikan bahwa keseimbangan jangka panjang dapat dicapai

dengan nilai kapital per kapita yang stabil (Boediono, 2009). Kondisi ini dapat dicapai dengan mengatur pengeluaran pemerintah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pandangan lain tentang pertumbuhan ekonomi adalah pandangan (Lane & Ersson, 2002). Pandangan ini menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu variabel ekonomi, variabel sosial, dan variabel politik. Variabel ekonomi identik dengan tingkat dan kemajuan investasi sebagai kunci proses pertumbuhan ekonomi. Variabel sosial merupakan variabel yang relevan dengan konteks sosial yang berimplikasi pada input tenaga kerja dan teknologi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel politik merupakan variabel yang identik dengan sebuah rezim yang mampu mempromosikan pertumbuhan ekonomi karena kapasitas mobilisasi sumber daya untuk kepentingan investasi (Syawie, 2011).

Pertumbuhan ekonomi yang baik pada setiap periode ke periode secara berkelanjutan pada akhirnya akan menciptakan suatu bentuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh seluruh wilayah dan negara. Kesejahteraan berkaitan erat dengan dimensi materi dan nonmateri. Pendekatan pendapatan dan konsumsi merupakan suatu ukuran kesejahteraan dari dimensi materi (Hukom, 2014). Pembangunan kesejahteraan masyarakat secara konseptual memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan sosial yang selaras dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Baharsyah, 1999; Hardiman, 1982). Gagalnya pembangunan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang kronis (Todaro & Smith., 2006:329).

Penelitian Terdahulu

Tulisan ini didasarkan pada dasar teori dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sejenis. Tabel berikut menyajikan secara ringkas beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

TABEL 1: Penelitian Terdahulu

Peneliti	Sampel	Hasil Penelitian
Faradisi (2015)	7 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Aceh pada tahun 2008-2011	Hasil penelitian menunjukkan beberapa hasil yaitu (1) variabel PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2008-2011, (2) variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2008-2011, (3) variabel dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2008-2011
Rimawan & Aryani (2019)	Kabupaten Bima pada tahun 2015-2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk mampu mengurangi kemiskinan.
Saputra, Wahyunadi, & Agustiani (2020)	Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sampai 2017.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing tidak mempunyai pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ekspor memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber: data diolah peneliti

Pengembangan Hipotesis

Tulisan ini akan melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Tulisan ini memasukkan 11 variabel yang diduga menjadi faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu akan dilakukan pengujian untuk membuktikan 8 hipotesis yang dikembangkan dari dasar teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Inflasi merupakan suatu hal yang memiliki peran dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi adalah suatu bentuk gejala meningkatnya harga-harga yang berlaku umum pada suatu perekonomian secara terus-menerus (Purnomo & Mudakir, 2020). Hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari pandangan Barro(1998) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dan sebaliknya ketika inflasi terkendali maka akan dapat mempercepat laju pertumbuhan. Pandangan ini didukung oleh beberapa hasil penelitian seperti dari Bibi, Ahmad, & Rashid (2014) yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tulisan ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

H2: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan pertumbuhan ekonomi

2. Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang penting pada suatu wilayah terkait pendapatan nasional. Menurut Schumpeter dalam Putong (2015:41) pertumbuhan ekonomi ialah suatu tambahan dari output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh tambahan tingkatan tabungan dan penduduk. Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang menyampaikan bahwa keseimbangan jangka panjang dapat dicapai dengan nilai kapital per kapita yang stabil (Boediono, 2009). Kondisi ini dapat dicapai dengan mengatur pengeluaran pemerintah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari item pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan pemerintah daerah dapat berupa pendapatan asli daerah dan/atau dana desa. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari pemungutan yang didasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan undang-undang dan belanja daerah yaitu kewajiban dari daerah yang diakui menjadi pengurang nilai kekayaan bersih daerah pada periode tertentu (Republik Indonesia, 2004). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa melalui transfer APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan penjelasan dari paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja daerah diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian dari Wahyudin & Yuliadi (2013) dan Rimawan & Aryani (2019) menunjukkan bahwa dana desa, PAD, dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini mengajukan tiga hipotesis selanjutnya yaitu sebagai berikut:

H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi

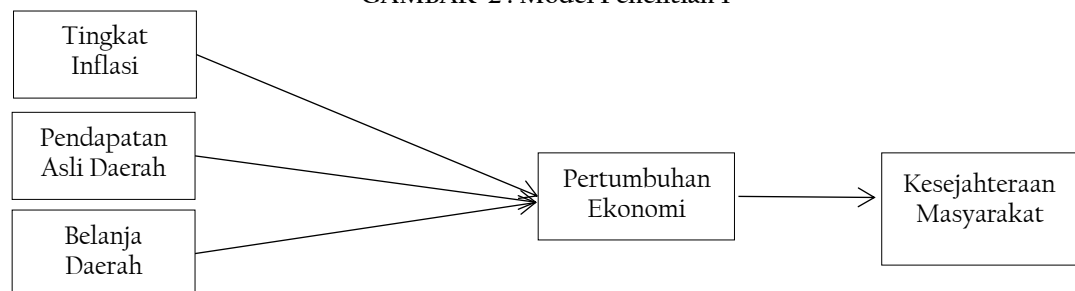
H5: Pengaruh positif Pendapatan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditentukan dari tingkat inflasi.

H6 : Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

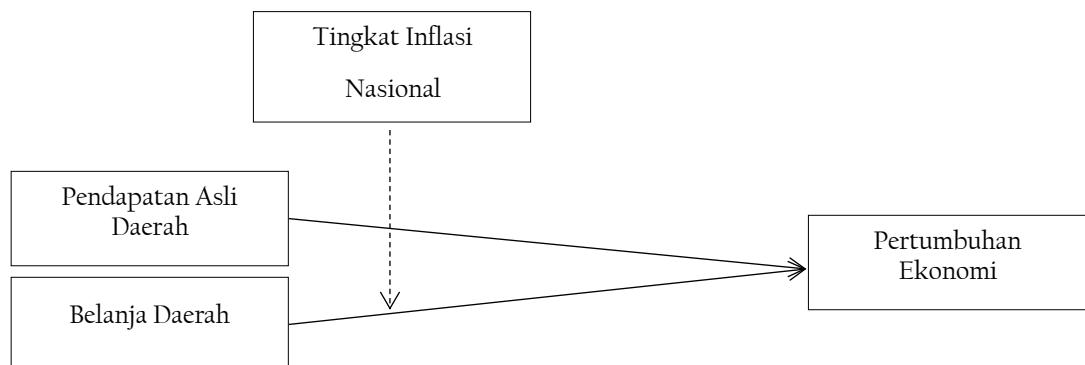
H7: Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi

H8: Pengaruh negatif Belanja Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditentukan dari tingkat inflasi.

GAMBAR-2 . Model Penelitian 1



GAMBAR-3. Model Penelitian 2



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik untuk menjawab masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai 2018. Proses *sampling* pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menggunakan kriteria yaitu kabupaten/kota memiliki seluruh data yang diperlukan oleh penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber data yaitu *website* Badan Pusat Statistik Jawa Timur (www.jatim.bps.go.id), *website* Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), *website* Badan Nasional Penanggulangan Bencana (www.bnbp.go.id), dan *website* Bappeda Jawa Timur (www.bappeda.jatim.go.id).

Penelitian ini akan melakukan pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, pada penelitian ini terdapat 3 jenis variabel yaitu variabel dependen (Y), variabel independen (X), dan variabel intervening. Tabel berikut menyajikan definisi operasional variabel pada penelitian ini.

TABEL 2: Definsi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Refrensi
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dari pembangunan yang dapat ditentukan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Variabel kesejahteraan masyarakat pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2015-2019	(Pratiwi & Indrajaya, 2019)
Pertumbuhan Ekonomi (Intervening)	Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menunjukkan kinerja perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Variabel pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2019.	(Fitri Tb & Aimon, 2019)
Tingkat Inflasi (X ₁)	Inflasi merupakan kondisi di mana harga-harga secara umum dan terus menerus mengalami suatu kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Variabel tingkat inflasi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen di Jawa Timur pada tahun 2015-2019	(Ma'ruf & Wihastuti, 2008)
Pendapatan Asli Daerah (X ₂)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber internal wilayah sendiri yang dipungut menggunakan dasar peraturan daerah sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Variabel Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai nominal realisasi PAD dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2019	(Faradisi, 2015)
Belanja Daerah (X ₃)	Belanja daerah merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan oleh daerah pada suatu periode. Variabel belanja daerah pada penelitian ini diukur dengan logaritma natural nilai realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2019	(Soewardi, Ananda, & Erlando, 2018)

Sumber: data diolah peneliti

Proses analisis data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini akan diuji secara statistik dengan menggunakan bantuan SPSS ver. 22.0. Proses pengujian yang dilakukan pada penelitian ini antara lain yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis regresi moderasi dan uji analisis jalur. Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur karena pada penelitian ini menggunakan variabel *intervening*. Adapun model persamaan regresi analisis jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 INF + + \beta_2 PAD + \beta_3 BD + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \alpha + + \beta_1 PAD * INF + \beta_2 BD * INF + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

$$Z = \alpha + \beta_1 Y + \varepsilon \dots\dots\dots(4)$$

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Proses Sampling

Tulisan ini melakukan proses sampling dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu kabupaten/kota yang memiliki seluruh data yang diperlukan oleh penelitian ini. Berdasarkan proses sampling yang telah dilakukan maka jumlah kabupaten/kota yang dapat digunakan pada penelitian ini hanya 8 kabupaten/kota, di mana kedelapan kabupaten/kota ini akan diobservasi selama 5 tahun yaitu 2014-2018. Dengan demikian,

jumlah observasi yang dilakukan adalah sebanyak 40 observasi. Adapun daftar kabupaten/kota yang dapat digunakan pada tulisan ini adalah sebagai berikut.

TABEL 3: Daftar Kabupaten/Kota yang Digunakan pada Penelitian

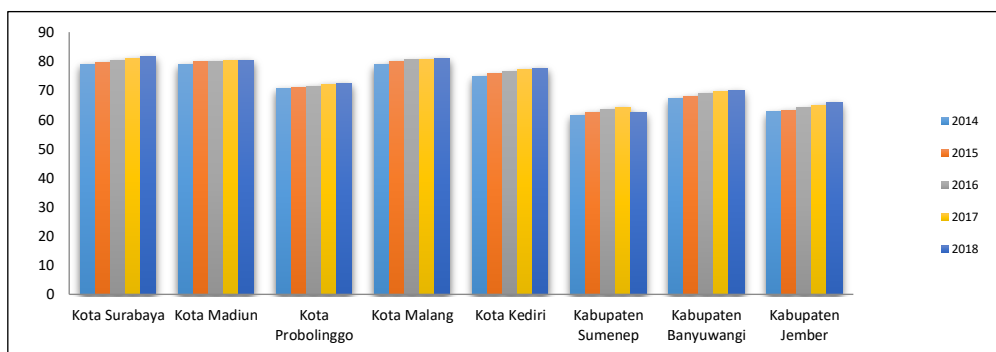
Nama Kabupaten/Kota	Periode Penelitian
Kota Surabaya	2014-2018
Kota Madiun	2014-2018
Kota Probolinggo	2014-2018
Kota Malang	2014-2018
Kota Kediri	2014-2018
Kabupaten Sumenep	2014-2018
Kabupaten Banyuwangi	2014-2018
Kabupaten Jember	2014-2018

Sumber: data diolah peneliti (2020)

Deskripsi Data Penelitian

Data yang pertama adalah data terkait tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada tahun 2014-2018. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambar berikut menyajikan mengenai data tingkat IPM pada tulisan ini.

GAMBAR-4. Tingkat IPM 2014-2018

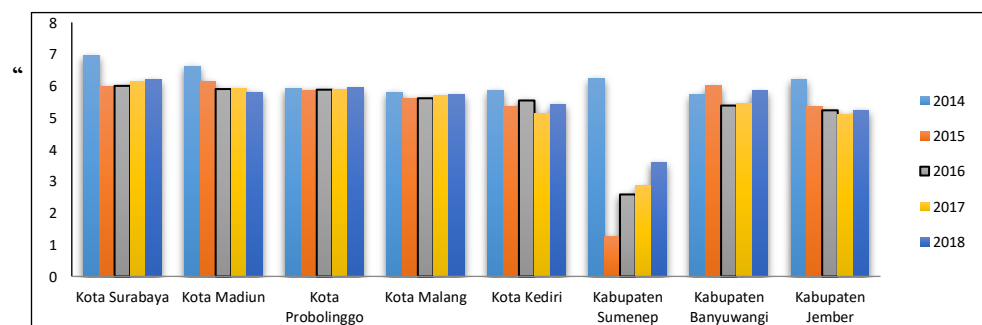


Sumber: data diolah peneliti (2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat IPM di Jawa Timur pada tahun 2014-2018 tidak ada yang mencapai nilai 90. Tingkat IPM tertinggi berada pada nilai 81,74 yaitu Kota Surabaya pada tahun 2018, sedangkan tingkat IPM terendah berada pada nilai 61,43 yaitu Kabupaten Sumenep tahun 2014. Rata-rata tingkat IPM pada tahun 2014-2018 berada pada kisaran 72,98.

Data pertumbuhan ekonomi pada tulisan ini diukur dengan nilai laju PDRB dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Gambar berikut menyajikan data pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018.

GAMBAR-5. Pertumbuhan Ekonomi 2014-2018

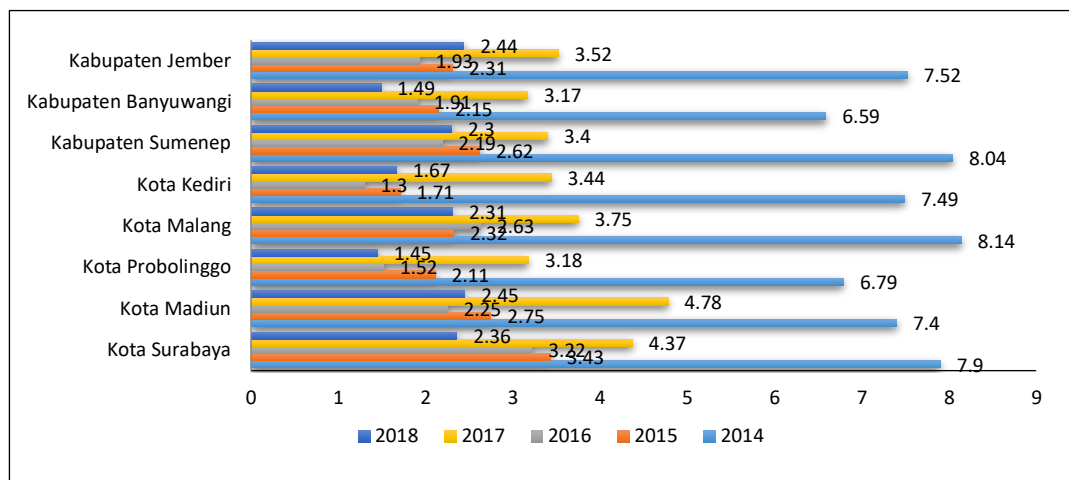


Sumber: data diolah peneliti (2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018 tidak ada yang mencapai 7%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 6,96% pada Kota Surabaya tahun 2014 sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu 1,27% pada Kabupaten Sumenep tahun 2015. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014-2018 berada pada kisaran 5,47%.

Data yang berikutnya adalah data terkait tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2014-2018 di Jawa Timur. Gambar berikut menyajikan data tingkat inflasi di Jawa Timur selama 2014-2018.

GAMBAR-6. Tingkat Inflasi 2014-2018

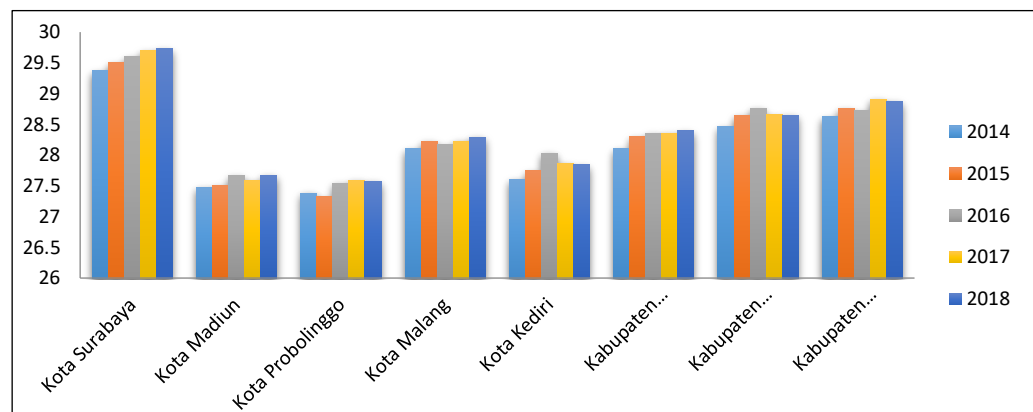


Sumber: data diolah peneliti (2020)

Gambar di atas menunjukkan mengenai inflasi pada 8 (delapan) kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur selama 2014-2018. Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi tidak ada yang lebih dari 8,5%. Dengan rata-rata tingkat inflasi yang terjadi selama 2014-2018 adalah sebesar 3,56%. Tingkat inflasi tertinggi yang terjadi selama tahun 2014-2018 adalah 8,14% yaitu pada Kota Malang di tahun 2014 dan tingkat inflasi terendah adalah 1,3% pada Kota Kediri tahun 2016.

Data yang berikutnya adalah data mengenai belanja daerah yang terjadi pada 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Data belanja daerah ini diukur dengan menggunakan logaritma natural realisasi belanja daerah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018.

GAMBAR-7. Belanja Daerah Tahun 2014-2018



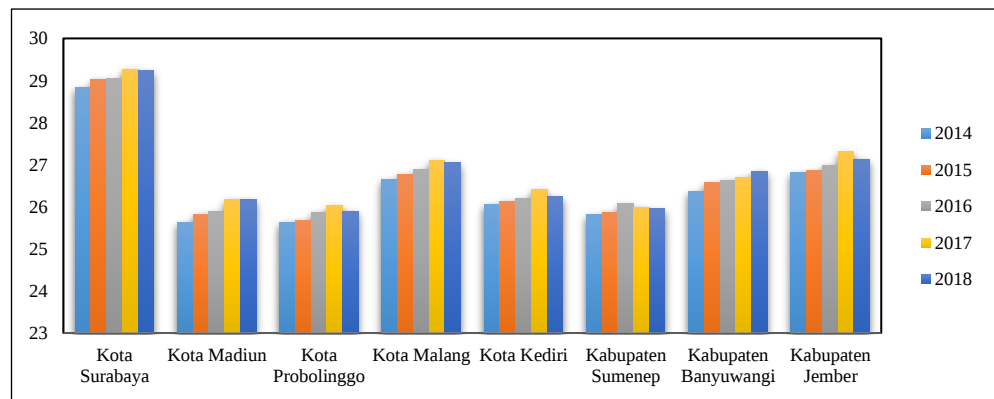
Sumber: data diolah peneliti (2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai logaritma natural dari belanja daerah pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 tidak lebih dari 30. Nilai logaritma tertinggi

adalah 29,73 atau setara dengan Rp 8.176.929.496.299 yang merupakan nilai realisasi belanja daerah pada Kota Surabaya tahun 2018. Selanjutnya, nilai logaritma natural dari belanja daerah yang terendah adalah 27,31 atau setara dengan Rp 731.680.260.277 yang merupakan nilai realisasi belanja daerah dari Kota Probolinggo pada tahun 2015. Rata-rata realisasi belanja yang terjadi pada tahun 2014-2018 adalah 28,29 atau setara dengan Rp 2 Triliun.

Data yang terakhir adalah data mengenai pendapatan asli daerah yang terjadi pada 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Data pendapatan asli daerah ini diukur dengan menggunakan logaritma natural pendapatan asli daerah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018.

GAMBAR-8. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018



Sumber: data diolah peneliti (2020)

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai logaritma natural dari pendapatan asli daerah pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018 tidak lebih dari 30. Nilai logaritma tertinggi adalah 29,27 atau setara dengan Rp 5.161.844.571.172 yang merupakan nilai realisasi pendapatan asli daerah pada Kota Surabaya tahun 2017. Selanjutnya, nilai logaritma natural dari belanja daerah yang terendah adalah 25,63 atau setara dengan Rp 135.062.805.887 yang merupakan nilai realisasi pendapatan asli daerah dari Kota Probolinggo pada tahun 2014. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah yang terjadi pada tahun 2014-2018 adalah 26,69 atau setara dengan Rp 390 Milyar.

Hasil Analisis

Proses analisis data yang dilakukan pertama kali dilakukan adalah analisis normalitas, di mana analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data penelitian. Tabel berikut menyajikan hasil analisis normalitas yang telah dilakukan.

TABEL 4: Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters	Mean	0,0000000000
	Std. Deviation	0,03404
Most Extreme Differences	Absolute	0,130
	Positive	0,094
	Negative	-0,130
Test Statistic		0,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,085

Hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,085. Dengan demikian, angka signifikansi ini lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa distribusi data pada penelitian ini memiliki distribusi yang normal.

Analisis data yang selanjutnya dilakukan adalah analisis uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 jenis uji yaitu autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Ketiga jenis uji ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa model regresi pada tulisan ini telah memenuhi kaidah BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Hasil uji yang pertama adalah hasil uji autokorelasi, di mana model regresi dikatakan lolos uji autokorelasi jika nilai $dU < dW < (4-dU)$. Tabel berikut menyajikan hasil uji autokorelasi pada tulisan ini.

TABEL-5: Hasil Uji Autokorelasi

Model	dU	dW	4-dU
Pengaruh langsung	1,3908	2,415	2,6092
INF→PE→KM	1,5490	1,83	2,451
BD→PE→KM	1,5490	1,773	2,451
PAD→PE→KM	1,5490	1,610	2,451
Moderasi	1,5490	2,275	2,451

Sumber: data output SPSS

Hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 5 model regresi yang ada pada tulisan ini, semua model terbukti terbebas dari gejala autokorelasi. Hal ini dbuktikan dengan nilai Durbin Watson yang dihasilkan lebih dari nilai dU dan lebih kecil dari 4-dU.

Uji selanjutnya yang dilakukan untuk uji asumsi klasik adalah uji multikolinieritas. Uji ini didasarkan pada nilai VIF yang dihasilkan untuk setiap model regresi yang ada pada tulisan ini. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan.

TABEL-6: Hasil Uji Autokorelasi

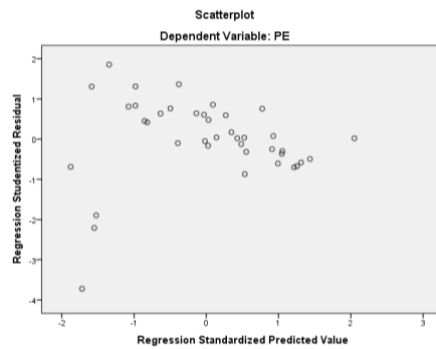
Model	Variance Inflation Factor (VIF)					
	INF	BD	PAD	PE	M1	M2
Pengaruh langsung	1,012	4,814	4,82	-	-	-
INF→PE→KM	1,108	-	-	1,108	-	-
BD→PE→KM	-	1,00	-	1,00	-	-
PAD→PE→KM	-	-	1,087	1,087	-	-

Sumber: data output SPSS

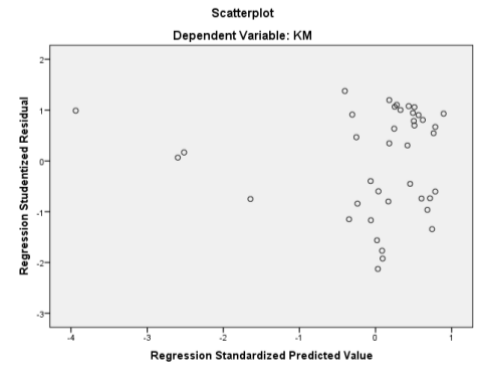
Hasil uji multikolinieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen untuk setiap model persamaan memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji terakhir yang dilakukan adalah uji heteroskedastisitas, di mana pada tulisan ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat *scatter plot*. Gambar berikut menyajikan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan pada tulisan ini.

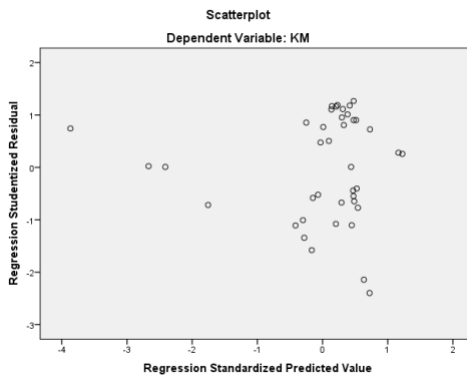
GAMBAR-9. Hasil Uji Heteroskedastisitas



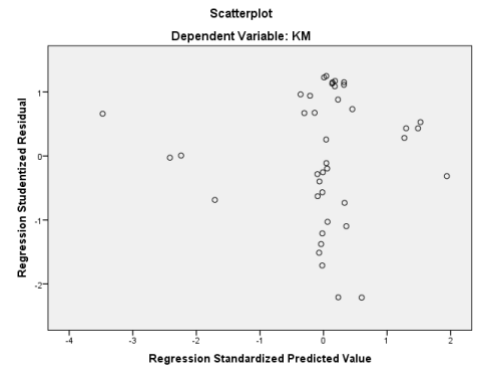
Model Pengaruh Langsung



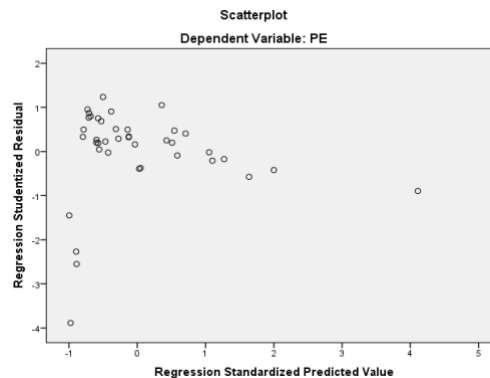
Model INF→PE→KM



Model BD→PE→KM



Model PAD→PE→KM



Model Moderasi

Gambar di atas menunjukkan mengenai hasil uji heteroskedastisitas untuk kelima model regresi pada penelitian ini. Berdasarkan *scatter plot* yang telah dihasilkan menunjukkan bahwa titik-titik tidak berkumpul dan membentuk pola. Titik-titik pada *scatter plot* menyebar, sehingga model regresi pada tulisan ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model regresi pada tulisan ini telah berhasil memenuhi asumsi BLUE. Oleh karena itu, proses analisis dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, di mana analisis selanjutnya yang dilakukan pada tulisan ini adalah analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan penjelas dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel berikut menyajikan nilai koefisien determinasi pada tulisan ini untuk setiap model regresi.

TABEL-7: Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R^2
Pengaruh langsung	0,393
INF→PE→KM	0,268
BD→PE→KM	0,237
PAD→PE→KM	0,283
Moderasi	0,186

Sumber: data output SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai R^2 dari model regresi yang ada pada tulisan ini memiliki nilai lebih dari 0. Selain itu, berdasarkan nilai R^2 menunjukkan bahwa kemampuan penjelas untuk setiap variabel independen dari seluruh model regresi yang ada adalah berkisar dari 18,6% sampai dengan 39,3% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengujian yang selanjutnya dilakukan adalah pengujian hipotesis penelitian. Pada tulisan ini pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada nilai beta dan nilai signifikansi. Hipotesis penelitian akan diterima jika nilai koefisien memiliki arah yang sama dengan hipotesis penelitian dan nilai signifikansi kurang dari 0,05%. Selain itu, untuk model persamaan mediasi dihitung dengan menggunakan sobel tes. Tabel berikut menyajikan hasil uji hipotesis penelitian yang ada pada tulisan ini.

TABEL-8: Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung & Moderasi

Hubungan	Koefisien	Signifikansi
INF→PE	-0,063	0,0275
BD→PE	-0,009	0,000
PAD→PE	0,007	0,000
BD*INF→PE	0,148	0,022
PAD*INF→PE	-0,162	0,018

Sumber: data output SPSS

TABEL-7: Hasil Uji Hipotesis Mediasi

Hubungan	Nilai Z	Signifikansi
INF→PE→KM	1.79145639	0,073
BD→PE→KM	2.87777682	0,004
PAD→PE→KM	2.66972561	0,008

Sumber: output Sobel Tes

Hasil uji hipotesis yang telah ditampilkan pada dua tabel di atas menunjukkan bahwa pada penelitian ini berhasil membuktikan beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh tingkat inflasi, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah. Kedua, tingkat inflasi mampu memperkuat pengaruh negatif belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi mampu memperlemah pengaruh positif dari pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

TABEL-8: Rekap Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Keterangan
H1	INF→PE	Diterima
H2	INF→PE→KM	Ditolak
H3	BD→PE	Diterima
H4	BD→PE→KM	Diterima
H5	BD*INF→PE	Diterima
H6	PAD→PE	Diterima
H7	PAD→PE→KM	Diterima
H8	PAD*INF→PE	Diterima

Sumber: data diolah peneliti

Pembahasan

Pengujian yang pertama dilakukan adalah pengujian pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tulisan ini ditemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien sebesar -0,063 dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu 0,0275. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika inflasi meningkat 1 nilai maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan nilai sebesar 0,063. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan pandangan (Barro, 1998) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dan sebaliknya ketika inflasi terkendali maka akan dapat mempercepat laju pertumbuhan. Selain itu, temuan dari tulisan ini juga mendukung hasil penelitian dari Bibi et al. (2014) yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

Pengujian selanjutnya pada tulisan ini belum menemukan adanya dampak dari pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada nilai z sebesar 1.79145639 (kurang dari 1,96) dan signifikan sebesar 0,073 (lebih dari 0,05) yang diperoleh dari uji sobel. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi mediator dari pengaruh tidak langsung antara inflasi dengan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini dapat dibenarkan dengan adanya asumsi bahwa pemerintah saat ini sering memberikan suatu bentuk subsidi bagi masyarakat seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa pada bidang pendidikan, bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada bidang kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan subsidi lainnya. Dengan demikian, adanya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pengujian yang juga dilakukan adalah pengujian terkait pengaruh belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada nilai koefisien dan signifikansi dari belanja daerah yaitu -0,009 dan 0,000 serta nilai koefisien dan signifikansi pendapatan asli daerah yaitu 0,007 dan 0,000. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai sebesar 1 pada belanja daerah dan pendapatan asli daerah akan menyebabkan perubahan sebesar -0,009 dan 0,007 pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian yang telah dilakukan juga memperlihatkan bahwa adanya pengaruh dari belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada nilai z dan signifikansi yang diperoleh dari uji sobel. Nilai z dan signifikansi dari uji sobel dampak dari pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 2.87777682 dan 0,004. Sedangkan, nilai z dan signifikansi dari uji sobel dampak dari pengaruh pendapatan asli daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 2.66972561 dan 0,008. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai z lebih dari 1,96 dan signifikansi kurang dari 0,005.

Hasil penelitian ini mendukung teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik. Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik menyampaikan bahwa keseimbangan jangka panjang dapat dicapai dengan nilai kapital per kapita yang stabil (Boediono, 2009). Kondisi ini dapat dicapai dengan mengatur pengeluaran pemerintah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dari Wahyudin & Yuliadi(2013) dan Rimawan & Aryani(2019) menunjukkan bahwa dana desa, PAD, dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh dari belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditentukan dari tingkat inflasi. Tingkat inflasi ditemukan dapat memperlemah pengaruh negatif dari belanja daerah. Ketika inflasi yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur melambung tinggi maka kondisi ini akan menyebabkan pemerintah harus memberikan subsidi yang besar untuk membantu penurunan harga dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan demikian, pengaruh negatif dari belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi akan berkurang sampai pada akhirnya akan berubah menjadi pengaruh yang positif. Selanjutnya tingkat inflasi juga dapat memperlemah pengaruh positif dari pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan jika inflasi terus melambung tinggi maka akan menyebabkan proses produksi yang terjadi menjadi lebih sedikit sehingga harga jual menjadi melambung tinggi yang pada akhirnya akan menyebabkan masyarakat mengeluarkan uang lebih untuk melakukan kegiatan konsumsi dan terkadang akan menyebabkan pembatasan terhadap konsumsi. Ketika terjadi pembatasan konsumsi maka otomatis akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh oleh industri menjadi kecil sehingga akan menyebabkan pendapatan asli daerah menurun dan pada akhirnya kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi dan bantuan demi menyeimbangkan kondisi perekonomian menjadi berkurang. Dengan demikian, pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi menurun.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tulisan ini berhasil menemukan bahwa inflasi, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. Dengan demikian, tulisan ini berhasil mendukung argumen dari teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang menyampaikan bahwa keseimbangan jangka panjang dapat dicapai dengan nilai kapital per kapita yang stabil (Boediono, 2009). Kondisi ini dapat dicapai dengan mengatur pengeluaran pemerintah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dapat mengendalikan laju inflasi serta mengatur penyesuaian antara belanja daerah dan pendapatan asli daerah di Jawa Timur.

Tulisan ini juga menemukan bahwa pengaruh belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditentukan dari tingkat inflasi. Jika inflasi tinggi maka akan semakin meningkatkan dampak negatif belanja daerah dan menurunkan dampak positif pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan daerah. Sebaliknya, jika inflasi rendah maka akan semakin menurunkan dampak negatif belanja daerah dan meningkatkan dampak positif pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pengendalian tingkat inflasi melalui penerapan kebijakan moneter yang tepat perlu dilakukan agar dapat menyeimbangkan dampak dari belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan yang terakhir pada tulisan ini juga membuktikan bahwa pengaruh dari belanja daerah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi akan memiliki dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil temuan ini, mendukung argumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik pada setiap periode ke periode secara berkelanjutan pada akhirnya akan menciptakan suatu bentuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, temuan pada tulisan ini juga

mengimplikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mampu menciptakan keseimbangan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah agar dapat menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang baik di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan gagalnya pembangunan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang kronis (Todaro & Smith., 2006).

Hasil pada tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan dasar kajian dengan tetap mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang dimiliki. Keterbatasan yang pertama adalah data mengenai tingkat inflasi pada Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota selama tahun 2014-2018 sangat sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan jenis data lain yang juga mampu menggambarkan salah satu bentuk gangguan kondisi makroekonomi pada suatu daerah. Keterbatasan kedua adalah jumlah penelitian sebelumnya yang melakukan pengujian terkait determinan pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan variabel moderasi dan menguji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih sedikit, sehingga justifikasi hasil penelitian belum terlalu kuat karena hanya didasarkan pada *grand theory* dan hasil penelitian pengaruh langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan keanekaragaman hasil variasi terkait penggunaan variabel moderasi pada penelitian terkait determinan pertumbuhan ekonomi dan pengujian dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat atau faktor lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019. *Www.Bps.Go.Id*, (17/02/Th. XXIV), 1-12. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2020). Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan II. *Badan Pusat Statistik Prov Jawa Timur*.
- Baharsyah, S. J. (1999). *Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial Pelajaran Dari Krisis*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Barro, R. J. (1998). *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*. Cambridge: The MIT Press.
- Bibi, S., Ahmad, S. T., & Rashid, H. (2014). Impact of Trade Openness, FDI, Exchange Rate and Inflation on Economic Growth: A Case Study of Pakistan. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2), 236-257. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v4i2.6482>
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFF.
- Fajrin, V., & Sudarsono, H. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Madura. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 21-33. <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5434>
- Faradisi, N. (2015). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Aceh. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 151-172. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2303>
- Fitri Tb, L. M., & Aimon, H. (2019). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 769-780.
- Hardiman, M. (1982). *The Social Dimensions of Development: Social Policy and Planning in the Third World (Social development in the Third World)*. United States: John Wiley & Sons Inc.
- Hukom, A. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120-129. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/44316-EN-hubungan-ketenagakerjaan-dan-perubahan-struktur-ekonomi-terhadap-kesejahteraan-m.pdf>
- Lane, J. E., & Ersson, S. (2002). *Ekonomi Politik Komparatif: Demokratisasi & Pertumbuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.

<https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>

- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2), 220–233. <https://doi.org/10.24843/bse.2019.v24.i02.p05>
- Purnomo, R. N., & Mudakir, B. (2020). Analisis Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Asean Tahun 2007 – 2017). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 20–35. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.2.20-35>
- Putong, I. (2015). *Ekonomi Makro: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan atas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia Serta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Saputra, I. D. M. B., Wahyunadi, & Agustiani, E. (2020). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014 : Tw1-2018 : Tw1. *ELASTISITAS Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 87–99.
- Soewardi, T. J., Ananda, C. F., & Erlando, A. (2018). Analisis Hubungan Kebijakan Fiskal Dan Makroekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1128–1148.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supartoyo, Y. H., Tatuh, J., & Sendouw, R. H. E. (2014). The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 16(1), 3–18. <https://doi.org/10.21098/bemp.v16i1.435>
- Syawie, M. (2011). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio Informa*, 16(02), 125–132. Retrieved from ejournal.kemsos.go.id
- Todaro, M. P., & Smith., S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 2 Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudin, D., & Yuliadi, I. (2013). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 120–126. <https://doi.org/10.18196/jesp.14.2.1255>